

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Demi keberlangsungan sebuah negara, telah berkembang berbagai paham dan sistem dalam menjalankan laju pemerintahan di berbagai negara. Setiap negara memerlukan sistem tata kelola. Sistem tata kelola ini merupakan alat untuk menanggapi perubahan yang berkesinambungan dalam sistem kehidupan manusia dan alam dengan cara yang mengamankan pembangunan berkelanjutan umat manusia (Biermann, 2007).

Akhir abad ke-20 masehi muncul sebuah konsep yang bisa dianggap paling mewakili rakyat, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional yang diambil oleh pejabat terpilih (Dahl, 1994). Sistem demokrasi menekankan adanya keterlibatan atau partisipasi warga negara. Partisipasi politik menjadi aspek penting sekaligus mewakili ciri khas dari modernisasi politik. (Halim, 2017)

Partisipasi warga negara secara luas dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini merupakan salah satu cara meningkatkan pembangunan di dalam negara yang menganut sistem demokrasi (Mudjiyanto, 2012). Pembangunan politik di Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik yang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa serta mampu dan mau berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan politik yang diselenggarakan oleh negara. Oleh karena itu sangat penting adanya keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Menurut van Deth (2001) demokrasi tidak

akan sesuai dengan namanya yaitu pemerintahan dari rakyat, apabila tidak ada keterlibatan yang berarti dari masyarakatnya.

Huntington & Nelson (1994) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sipil yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik merupakan aspek terpenting dalam sebuah tatanan negara demokrasi (Subekti, 2014). Hal ini dikarenakan partisipasi politik akan memengaruhi adanya legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Selama ini, bentuk partisipasi politik yang seringkali diukur dan terlihat adalah keikutsertaan dalam pemilu (Dalton, 1996). Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 14 juta orang atau sekitar 30% dari total pemilih keseluruhan. Meskipun persentase partisipasi pemilih meningkat dari 2004 dan 2009, persentase ini masih tergolong lebih rendah apabila dibandingkan dengan pemilu 1999. Dari penelusuran Detikcom (2014), tercatat angka partisipasi masyarakat sebesar 93,30% dengan angka golongan putih (golput) 6,70% pada Pemilu 1999 (detikNews, 2014). Sedangkan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah bulan Juni 2018, Ihsanudin (2018) mencatat dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 152.079.997 pemilih, sebanyak 73 persen diantaranya menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.

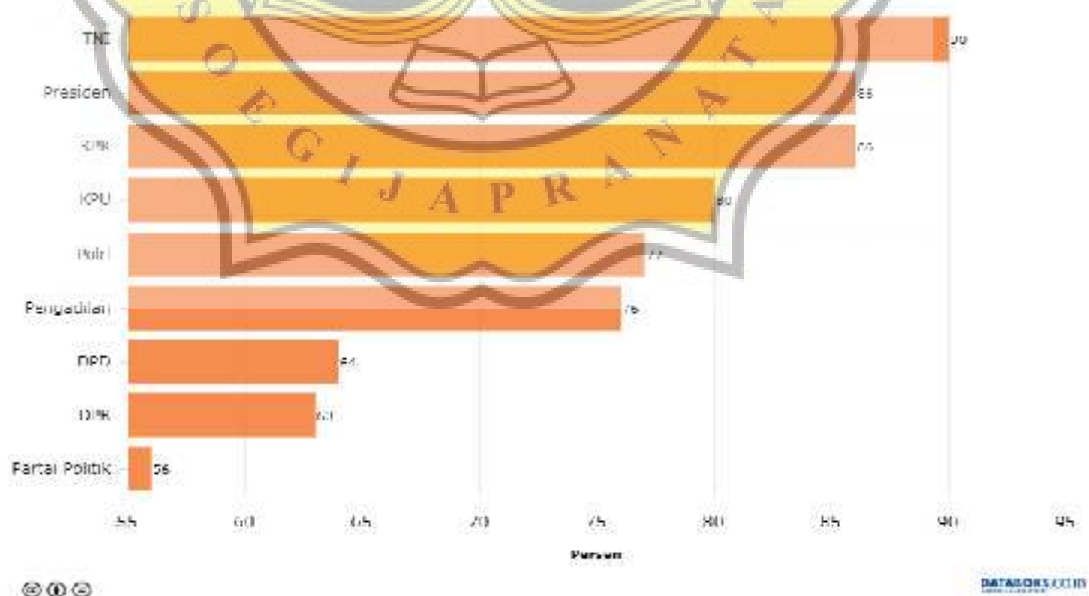
**Tabel 1.1 Rekapitulasi Persentase Golput Pemilihan Presiden**

<b>Tingkat Partisipasi</b>	<b>Persentase</b>
Pilpres 2004	13,30 %
Pilpres 2009	27,45%
Pilpres 2014	30,42%
Pilpres 2019	19,24%

Sumber :BBC Indonesia, 3 Mei 2019

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan setidaknya terdapat 192 juta pemilih yang berada di dalam dan luar negeri. Terdapat penurunan golput yang signifikan pada pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan data Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat penurunan persentase golput yang signifikan pada pemilu presiden tahun 2019. Namun, penurunan golput pada pilpres 2019 bertolak belakang dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, dimana angka golput hampir menyentuh 30%, meningkat 6% dari Pileg 2014 (Anonim, 2019).

Data SMRC (Saiful Mudjani *Research Center*) pada tahun 2017 sebagaimana diulas oleh Katadata.co.id menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, partai politik menjadi lembaga dengan kepercayaan dari masyarakat terendah dengan persentase 52% diikuti DPR (63%), KPK (86%), Presiden (86%), dan TNI (90%).



Gambar 1.1 Persentase Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara (dalam persen)

Mengingat salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik, kepercayaan terhadap institusi politik menjadi sangat penting. Kepercayaan kepada institusi politik akan menciptakan dukungan serta partisipasi lebih aktif lagi bagi warga negara (Subagyo, 2009). Namun, pada kenyataannya politik praktis yang terjadi di Indonesia cenderung mempertontonkan saling rebut kekuasaan (Ali, 2006). Selain itu, berbagai kasus dan skandal cukup sering menimpa para elit politik seperti korupsi, perilaku tak etis, intrik politik, dan berbagai hal negatif semakin dihembuskan oleh media, termasuk media sosial yang kini menjadi bagian kehidupan kaum muda. Di dalam sistem demokrasi, politik seharusnya bersifat publik, dimana melalui mekanisme pemilu *one man one vote*, rakyat menitipkan kedaulatannya kepada para anggota dewan. Tak sampai di situ, esensi dari demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan, tetapi yang terjadi rakyat seolah-olah hanya menjadi pemberi suara dan sebatas pemberi legitimasi bagi elite-elite yang berkuasa. Mereka tak pernah merasa diwakili oleh siapapun, dengan kata lain rakyat hanya dijadikan sebagai lumbung suara untuk memastikan legitimasi posisi politisi.

Peningkatan partisipasi politik yang terjadi menunjukkan jika orang-orang merasa memperoleh banyak pengaruh yang berkaitan dengan politik, maka akan cenderung menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan politik dibandingkan hanya menjadi subjek politik pasif (Mierina, 2016). Sebaliknya, bagi mereka yang menarik partisipasinya, tidak sedikit dari mereka yang masih melihat bahwa politisi atau pelaku politik yang ada saat ini tidak dapat dipercaya. Hal ini menjelaskan bahwa suatu situasi kepercayaan pada otoritas politik tidak

membalik, maka peningkatan efikasi politik bisa menjadi indikasi awal dari masa depan yang lebih bergolak secara politis.

Fluktuasi partisipasi politik yang terjadi menurut Erbas (2014) dikarenakan karena pemilih muda ataupun mahasiswa tidak memiliki ketertarikan dalam dunia politik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketertarikannya perlu diberikan arahan informasi dan motivasi tentang politik, sehingga dengan adanya arahan ini, mereka bisa menganggap bahwa penting untuk mengikuti pemilihan umum sebagai kepentingan masyarakat.

Individu yang menarik diri dari keikutsertaan dalam pemilihan umum seringkali disebut sebagai golongan putih (Golput). Mereka yang menarik diri dari proses pemilihan umum dapat dipicu oleh berbagai faktor. Susila dan Sukmawati (2013) mengatakan bahwa penurunan partisipasi politik dipicu oleh menurunnya kepercayaan politik terhadap politisi, yaitu publik menilai tidak banyak politisi yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat, kuatnya persepsi publik bahwa politisi yang hipokrit, dan publik melihat semakin lebarnya jarak antara klaim dan ajaran agama dengan para politisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2009) mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2008 menyatakan tingkat partisipasi politik masyarakat di kabupaten Purworejo menunjukkan sebesar 61,2% responden kurang berpartisipasi secara aktif pada pemilu gubernur 2008 dan memilih berdasarkan pilihan rasionalnya sendiri. Sebesar 51,2% pemilih lebih mempertimbangkan latar belakang/ karakter pribadi calon gubernur.

Menurut van Deth (dalam Wirathama 2013) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu struktural, sosiologis, ekologis,

psikologi sosial, dan pilihan rasional. Faktor struktural meliputi sistem partai, sistem pemilihan umum dan program yang ditawarkan partai. Faktor sosiologis meliputi status sosial, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan dan agama. Faktor ekologis meliputi bagian wilayah baik pedesaan, perkotaan, dan seterusnya. Faktor pilihan rasional menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak berdasarkan pertimbangan keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor pendekatan psikologi sosial, dalam kaitannya dengan partisipasi politik, faktor ini meliputi persepsi masyarakat terhadap partai tertentu yang berkaitan dengan kondisi sosio-psikologis masyarakat atau dalam kata lain menitikberatkan pada faktor orientasi kehidupan. Dalam pendekatan psikologis, perilaku tidak partisipatif dalam politik disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. Keberadaan alienasi yang tinggi mungkin akan menimbulkan aksi politik alternatif, seperti melalui kerusuhan, demonstrasi, penarikan diri dari kegiatan politik dan sebagainya (Blitar, 2014)

Secara teoritik, penurunan tingkat partisipasi politik berawal dari meluasnya perasaan alienasi bahwa pemilu tidak terkait dengan kepentingan pragmatis pemilih. Kepercayaan politik yang rendah terhadap proses-proses politik, termasuk pemilu, menjadikan pemilih merasa bahwa pilihan suara mereka tidak akan mengubah keadaan. Rendahnya kepercayaan politik seringkali menjangkiti segmen pemilih pemuda. Pemilih pemuda sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kelompok apatis atau apolitis yang biasanya teralienasi dari sistem politik yang ada, serta kelompok pemuda yang rasional atau kritis yang bisa berujung pada golput atau memilih partai (Muhtadi, 2009). Alienasi sendiri

menurut Citrin (1977) dapat diartikan sebagai kondisi dimana individu merasa terasing daripada keadaan sosialnya.

Kemudian untuk mengetahui keterkaitan alienasi sebagai faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik, dilakukan survey pendahuluan. Data yang peneliti dapatkan dari survey kepada 24 orang mahasiswa dengan rentang usia 19 hingga 24 tahun pada 29 Maret 2019 menunjukkan bahwa 15 orang (65,2%) responden tidak akan menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019, 6 responden (26,1%) akan menggunakan hak pilihnya serta 2 responden (8,7%) tidak tahu. Alasan kenapa mereka tidak akan menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Hasil Survei Awal**

Pernyataan	Jumlah Responden	Prosentase
Malas menuju TPS	6	40%
Pendatang	3	20%
Tidak tahu calonnya	3	20%
Merasa tidak ada manfaat yang jelas	3	20%
<b>Jumlah</b>	<b>15 orang</b>	

Jika mengacu pada aspek alienasi menurut Seeman (dalam Astanto, 1993), tiga orang merasa bahwa mengikuti pemilu tidak ada manfaat yang jelas, menunjukkan adanya aspek alienasi, yaitu ketidakbermaknaan atau *meaninglessness*. Individu yang mengalami alienasi merasa bahwa tindakan yang dilakukannya tidak akan memiliki dampak apapun setelah individu tersebut melakukan tindakannya (Seeman, 1959).

Ketidakpuasan terhadap kebutuhan akan aspirasi dan harapan yang terus meningkat akan meningkatkan rasa frustrasi dan kecemasan. Frustrasi akan memunculkan keterasingan (alienasi) dari sistem politik dan lebih mungkin untuk

melakukan kegiatan politik secara ekstrem, seperti kekerasan politik (Renshon, 1974).

Perasaan alienasi yang dirasakan oleh seorang individu dapat mengakibatkannya untuk memilih lebih aktif dengan menciptakan ruang untuk bersuara dan berkreasi yang masih tersisa. Dalam hal ini, individu dapat menjadi partisipan aktif dalam pemilihan umum dengan ikut memilih salah satu organisasi partai politik atau sebaliknya, menarik diri dari politik dan mempercayai "*unseen hand*" akan bekerja dengan sendirinya. (Kamrava, 1995).

Gejala alienasi memiliki ancaman yang serius untuk perkembangan politik dan demokrasi suatu negara. Muluk (2010) menjelaskan berbagai bahaya mengintip dari alienasi politik seperti: Pertama, sukarnya mendorong tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dan konstruktif. Tingginya Alienasi politik cenderung mengakibatkan proses penarikan diri (*withdrawal*) terhadap aktivitas politik. Kedua, meningkatnya ketidakpercayaan politik (*political untrust*). Ketidakpercayaan politik memang bisa menjadi *anteseden* untuk tidak berpartisipasi dalam politik, namun bisa juga menjadi *anteseden* untuk tindakan-tindakan politik menyimpang diluar aturan konvensional. Gejala-gejala "parlemen jalanan", aksi boikot, merupakan cerminan perasaan ketidakpercayaan ini. Ketiga, dukungan terhadap keberlanjutan (*political support & political sustainability*) bisa terancam. Tentunya ketiadaan dukungan terhadap keberlanjutan suatu sistem politik suatu negara merupakan problem yang sangat serius, itu artinya sama dengan bubarnya sistem politik suatu negara.

Fromm (dalam Paramita, 2012) mengatakan bahwa alienasi sebagai modus kehidupan pada manusia dalam menghayati dirinya sebagai sesuatu yang asing. Manusia dapat dikatakan telah terpisah dengan dirinya sendiri



sebagai pusat dunianya, pencipta tindakannya sendiri sebaliknya tindakan atau akibat dari hal tersebut berbalik menjadi sesuatu yang dipatuhinya. Merasa terasing atau teralienasi merupakan faktor yang memicu rendahnya partisipasi politik. Penelitian yang dilakukan peneliti menekankan pada alienasi, berarti individu menarik diri atau terpisah dengan kehidupan sosialnya yang akan berdampak pada penarikan diri individu terhadap partisipasinya dalam politik.

Oleh karena itu, peneliti berusaha mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan alienasi dengan partisipasi politik dengan mempertanyakan apakah ada hubungan antara alienasi dengan partisipasi politik pada mahasiswa

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara alienasi dengan partisipasi politik pada mahasiswa.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

#### **1.3.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam ilmu pengetahuan Psikologi Politik, khususnya mengenai partisipasi politik.

#### **1.3.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah maupun pihak terkait untuk dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan mahasiswa.